

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan hutan pada dasarnya menjadi kewenangan pemerintah, dimana sasaran yang ingin dicapai dalam pengelolaan hutan adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang tinggal disekitar kawasan hutan. Maka dari itu pengelolaan hutan harus dilaksanakan secara optimal. Pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengatasi gangguan yang mengancam keberadaan hutan, program disusun oleh pemerintah dalam rangka memperbaiki tata kelola serta pembangunan sektor kehutanan secara nasional. Paradigma pengelolaan hutan yang menuju arah pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan kapasitas masyarakat lokal/masyarakat sekitar hutan yang tidak hanya sebagai objek dalam pembangunan kehutanan, namun juga dilibatkan sebagai subjek pembangunan kehutanan (Suprpto, 2014).

Pada tahun 2015-2019, pemerintah mengalokasikan lahan seluas 12,7 juta hektare untuk program perhutanan sosial, khususnya lima skema pada kawasan hutan. Hingga tahun 2019 ditargetkan 5.000 kelompok usaha sosial dan kemitraan akan dikembangkan melalui program perhutanan sosial. Kelompok-kelompok inilah yang diharapkan mewedahi masyarakat miskin sekitar hutan dan dapat berkembang, serta pada akhirnya meningkat kesejahteraannya. Presiden Joko Widodo dalam acara peluncuran perhutanan sosial menegaskan, bahwa program perhutanan sosial harus tepat sasaran, yaitu ditujukan pada masyarakat miskin, berlahan sempit, atau tuna lahan, dan mereka yang selama ini sangat bergantung pada hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam implementasi konsep kehutanan masyarakat, pihak Taman Nasional memberi akses kepada masyarakat untuk dapat mengelola lahan hutan dengan mengacu kepada aturan yang berlaku. Salah satunya melalui skema kemitraan yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.9/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2021 Tentang Perhutanan Sosial.

Kemitraan konservasi atau pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan kawasan, sudah dilakukan pemerintah sejak lama. Jika merunut dari berbagai kebijakan pemerintah, kemitraan atau pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan dimulai sejak lahirnya UU No. 5 Tahun 1990 hingga saat ini. (UU No. 5 Tahun 1990) menegaskan bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, merupakan tanggungjawab dan kewajiban pemerintah serta masyarakat, dan pemerintah perlu mengikutsertakan masyarakat dalam berpartisipasi untuk rehabilitasi kawasan konservasi akibat bencana alam atau pemanfaatan kawasan konservasi yang tidak tepat. Sumarto (2009) berpendapat, bahwa partisipasi memiliki makna suatu proses ketika warga (sebagai individu, kelompok sosial dan organisasi) mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan yang berdampak pada kehidupan mereka. Sejak dari pengusulan kemitraan konservasi kepada unit pengelola kawasan konservasi, pemerintah juga perlu melihat dari aspek persepsi dan bagaimana suatu tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi sebelum menyusun rencana kemitraan konservasi dan melakukan monitoring serta evaluasi pelaksanaan kemitraan konservasi.

Kemitraan konservasi itu sendiri memiliki program pemberdayaan yang mengutamakan prinsip-prinsip kesepakatan, kesetaraan, saling menguntungkan, lokal spesifik, kepercayaan, transparansi, dan partisipasi dalam pelaksanaannya. Kemitraan konservasi akan membuka lebar peluang usaha dan informasi pasar, antara lain dengan menekan hambatan birokrasi (Kymlicka, 2002). Sektor kehutanan harus berupaya untuk memperkuat jejaring usaha dan manajemen di tingkat kelompok tani hutan. Penguatan kelembagaan di tingkat petani di berbagai daerah terbukti mendorong perbaikan produktivitas sumber daya dan nilai tambah usaha hasil hutan termasuk hasil kayu, non-kayu serta jasa lingkungan (Saipurrozi et al, 2018). Salah satu kawasan konservasi di Sulawesi Selatan yang menerapkan adanya kemitraan konservasi yaitu pada Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, yang terletak dalam 3 wilayah kabupaten yaitu, Maros, Pangkep dan Bone. Berbatasan langsung dengan 10 kecamatan, 40 desa dan 71 dusun/lingkungan

(Dephut, 2007).

Sesuai dengan surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 10850/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2019 tentang pengakuan dan perlindungan kemitraan konservasi antar Kelompok Tani Sonrae dengan Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung seluas 71,41 hektar pada kawasan konservasi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung di Desa Rompegading, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, bahwa pengelola hutan wajib melaksanakan kemitraan kehutanan dengan masyarakat setempat sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (2), Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemegang dan pengakuan dan perlindungan kemitraan konservasi Kelompok Tani Sonrae mendapat pembinaan, pendampingan teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Maros.

Pengelolaan kolaboratif dalam kawasan Taman Nasional dimaksudkan untuk mengurangi dampak kerusakan ekosistem kawasan akibat berbagai kepentingan dari para pihak di satu sisi, dan pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dalam meningkatkan kesejahteraannya di sisi lain (Kymlicka, 2002). Dengan pengelolaan kolaboratif, yang disuguhkan kepada masyarakat lokal tidak lagi hanya hal-hal yang baik tentang manfaat Taman Nasional apabila terpelihara dengan baik, ataupun tidak lagi memunculkan pertanyaan; lebih penting mana hewan yang ada dalam kawasan hutan dibandingkan dengan masyarakat sendiri? sementara kehidupan mereka masih berkekurangan. Mengajak masyarakat memelihara kelestarian taman nasional akan terwujud apabila mereka merasa tidak kehilangan hak-hak sosial dan ekonomi yang diperoleh dari kawasan yang kemudian ditetapkan sebagai taman nasional (Kymlicka, 2002).

Penerapan kemitraan konservasi dalam pengelolaan kawasan konservasi di Desa Tompobulu masih memiliki masalah dalam aspek

pemerataan sosial dan ekonomi serta pengelolaan lahan oleh masyarakat. Tanaman budidaya yang ada dalam kawasan juga masih belum terkelola dengan baik, dikarenakan kurangnya masyarakat yang mengelola getah pinus dan lebah trigona. Oleh karena itu, perlu melakukan penelitian ini agar masyarakat dan kemitraan konservasi dapat berjalan selaras. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan berbasis kemitraan konservasi. Melalui hasil penelitian ini, diharapkan seluruh rangkaian program kemitraan konservasi yang dijalankan oleh masyarakat Desa Rompegading dapat memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi.

1.2 Teori

Kemitraan konservasi merupakan program pemberdayaan yang mengutamakan prinsip-prinsip kesepakatan, kesetaraan, saling menguntungkan, lokal spesifik, kepercayaan, transparansi, dan partisipasi dalam pelaksanaannya. Kemitraan konservasi akan membuka lebar peluang usaha dan informasi pasar, antara lain dengan menekan hambatan birokrasi. Sektor kehutanan harus berupaya untuk memperkuat jejaring usaha dan manajemen di tingkat kelompok tani hutan. Penguatan kelembagaan di tingkat petani di berbagai daerah terbukti mendorong perbaikan produktivitas sumberdaya dan nilai tambah usaha hasil hutan termasuk hasil kayu, non-kayu serta jasa lingkungan (Saipurrozi et al., 2018).

Kemitraan konservasi atau pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan kawasan konservasi, sebenarnya sudah dilakukan pemerintah sejak lama. Jika merunut dari berbagai kebijakan pemerintah, kemitraan atau pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan dimulai sejak lahirnya UU No. 5 Tahun 1990 hingga saat ini. (UU No. 5 Tahun 1990) menegaskan bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, merupakan tanggungjawab dan kewajiban pemerintah serta masyarakat, dan pemerintah perlu mengikutsertakan masyarakat dalam berpartisipasi untuk rehabilitasi kawasan konservasi akibat bencana alam atau pemanfaatan kawasan konservasi yang tidak tepat. Sejak dari pengusulan kemitraan konservasi kepada unit pengelola kawasan konservasi, pemerintah juga perlu melihat dari

aspek persepsi dan bagaimana suatu tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi sebelum menyusun rencana kemitraan konservasi dan melakukan monitoring serta evaluasi.

Paradigma pengelolaan hutan yang menuju arah pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan kapasitas masyarakat lokal/masyarakat sekitar hutan yang tidak hanya sebagai objek dalam pembangunan kehutanan, namun juga dilibatkan sebagai subjek pembangunan kehutanan. Pada tahun 2015-2019, pemerintah mengalokasikan lahan seluas 12,7 juta hektare untuk program perhutanan sosial, khususnya lima skema pada kawasan hutan. Hingga tahun 2019 ditargetkan 5.000 kelompok usaha sosial dan kemitraan akan dikembangkan melalui program perhutanan sosial (Suprpto, 2014).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia persepsi yaitu tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Secara etimologis, persepsi dalam Bahasa Inggris *perception* berasal dari Bahasa Latin *perception*, dari *percipere* yang artinya menerima atau mengambil. Persepsi dalam arti sempit adalah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas adalah pandangan atau pengertian, bagaimana seseorang memandang dan mengartikan sesuatu (Sobur, 2009). Persepsi terjadi di dalam benak individu yang mempersepsi, bukan di dalam objek dan selalu merupakan pengetahuan tentang penampakan. Maka yang mudah bagi kita belum tentu mudah bagi yang lain maupun sebaliknya, sehingga dalam konteks ini kita perlu memahami pribadi dari komunikasi antar pribadi dengan melihat lebih sifat-sifat dari persepsi diantaranya, persepsi adalah pengalaman, selektif, penyimpulan, persepsi tidak akurat dan persepsi evaluatif (Fajar, 2009). Menurut Achmad Mubarak, dalam bukunya yang berjudul "Psikologi Dakwah" (2014) menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya persepsi antara lain:

1. Faktor Fungsional

Faktor fungsional yang mempengaruhi persepsi antara lain adalah faktor kebutuhan, kesiapan mental, suasana emosional, dan latar belakang budaya

2. Faktor Stuktural

Menurut teori *Gestalt*, yang diperkenalkan pertama kali oleh Max Wertheimer tahun 1912 dikatakan bahwa dalam pengamatan atau persepsi, suatu stimulus ditangkap secara keseluruhan bukan penjumlahan rangsangan-rangsangan kecil. Bila seseorang mempersepsikan makan ia akan mempersepsikannya sebagai suatu keseluruhan, bukan bagian-bagian.

Partisipasi merupakan komponen penting dalam membangkitkan kemandirian dan proses pemberdayaan seseorang (Craig dan May, 1995 dalam Hikmat, 2004). Lebih lanjut Hikmat (2004) menjelaskan pemberdayaan dan partisipasi merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial dan transformasi budaya. Proses ini, pada akhirnya akan dapat menciptakan Pembangunan yang berpusat pada rakyat. Partisipasi masyarakat menurut Mardikanto (2015), mengemukakan tentang lingkup partisipasi dengan bertolak pada urutan proses perencanaan Pembangunan, maka secara rinci jenis partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebagai berikut:

a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam tahapan dan seluruh prosesnya. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan penting karena masyarakat berhak untuk menentukan arah dan orientasi pembangunan.

b. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan.

Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan adalah keterlibatan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu kegiatan secara sukarela, spontan dan bertanggung jawab.

c. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan

Partisipasi masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan dilakukan dengan cara, mengundang partisipasi masyarakat dalam proses pemantauan dan evaluasi, menyediakan saluran untuk masyarakat memberikan umpan balik dan masukan, menumbuhkan pemberdayaan masyarakat dan membangun kohesivitas antara

masyarakat dengan pengelola.

d. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil Pembangunan

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan dapat diwujudkan dengan cara, memantau hasil-hasil pembangunan, mengevaluasi proses pembangunan, memelihara hasil-hasil pembangunan.

Adisasmita dalam (Sapri et al., 2019) mengemukakan bahwa jenis partisipasi terdiri dari:

- a. Partisipasi uang atau harta benda yaitu partisipasi dalam memberikan harta benda atau uang.
- b. Partisipasi tenaga yaitu memberikan sumbangsih tenaga fisik dalam pelaksanaan kegiatan. Partisipasi keterampilan adalah memberikan keahlian yang dimiliki kepada masyarakat lainnya yang membutuhkan.
- c. Partisipasi ide pikiran adalah partisipasi berupa sumbangan pikiran, pendapat yang konstruktif dalam memperlancar pelaksanaan program dan mengembangkannya.
- d. Partisipasi di dalam pengambilan kebijakan, di mana masyarakat terlibat dalam setiap kegiatan pengambilan kebijakan yang ada kaitannya dengan kepentingan bersama.

Isu partisipasi mulai merambah ke ranah pengelolaan kehutanan sejak dikenalkannya pendekatan sosial pada akhir tahun 1970-an. Istilah partisipasi berasal dari bahasa Latin "*participare*" yang mempunyai arti "mengambil bagian" atau "turut serta". Dari sudut terminologi menurut Najih (2006), partisipasi diartikan sebagai suatu cara melakukan interaksi antara dua kelompok, yaitu kelompok yang selama ini tidak diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan (*non-elite*) dan kelompok yang selama ini melakukan pengambilan keputusan (*elite*). Perlunya peran serta masyarakat diungkapkan Hardjasoemantri dalam Najih (2006), yakni selain memberikan informasi yang berharga kepada para pengambil keputusan, peran serta masyarakat dapat mereduksi kemungkinan ketidaksediaan untuk menerima keputusan. Terkait dengan pengelolaan kawasan konservasi, maka tujuan yang ingin dicapai adalah terjadinya penurunan konflik antara pemerintah dengan masyarakat.

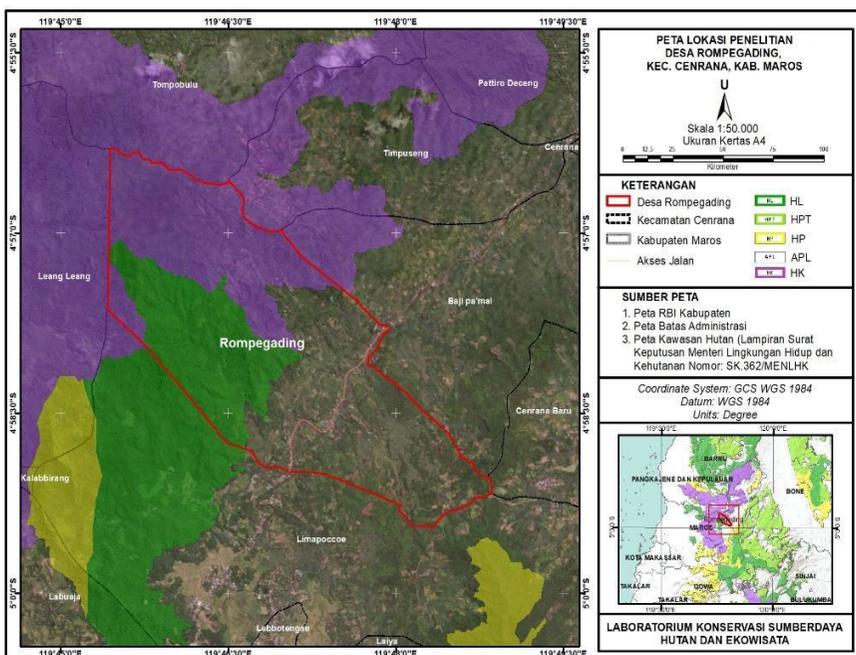
Sementara Sumarto (2009) berpendapat, partisipasi memiliki makna suatu proses ketika warga (sebagai individu, kelompok sosial dan organisasi) mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung berdampak pada kehidupan mereka.

BAB 2. METODE PENELITIAN

2.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2024. Lokasi penelitian bertempat di Desa Rompegading, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros. Secara administratif Desa Rompegading terletak di Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Kecamatan Cenrana terdiri atas 7 Desa, yaitu Desa Laiya, Desa Labuaja, Desa Lebbotengae, Desa Cenrana Baru, Desa Limampocoe, Desa Baji Pamai dan Desa Rompegading. Secara Geografis, Kecamatan Cenrana terletak pada koordinat $5.0245977^{\circ}\text{S}$ $119.738378^{\circ}\text{E}$. Luas wilayah Desa Rompegading $17,97\text{ km}^2$ dengan ketinggian 715 mdpl. Adapun batas wilayah Desa Rompegading yaitu :

- Sebelah Utara : Desa Tompobulu
- Sebelah Selatan : Desa Limampocoe
- Sebelah Timur : Desa Baji Pamai dan Desa Cenrana Baru
- Sebelah Barat : Kelurahan Leang-leang (Kecamatan Bantimurung)



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

2.2 Alat dan Bahan Penelitian

Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

1. Kuesioner, digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis.
2. Alat tulis menulis, digunakan sebagai sarana penunjang dalam mencatat hasil wawancara penelitian.
3. Handphone, digunakan untuk mendokumentasikan dan merekam hasil wawancara serta hal-hal yang berkaitan dengan kelengkapan data penelitian di lapangan.

2.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu, melalui proses wawancara terstruktur dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner merupakan seperangkat pertanyaan sistematis dan terstruktur yang ditujukan kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2015).

2.4 Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekelompok objek atau subjek yang memiliki dan mempunyai kualitas serta karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010). Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Rompegading, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, termasuk aparat pemerintah Desa.

Dalam penelitian ini, untuk menentukan jumlah responden digunakan perhitungan rumus Slovin, dimana populasi yang digunakan untuk menentukan ukuran sampel yaitu berasal dari masyarakat Desa Rompegading, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros. Berikut pengaplikasian dari penggunaan rumus Slovin yaitu (Prasetyo dan Jannah, 2010):

$$n = \frac{N}{1 + (N \times e^2)}$$

Keterangan:

n : Ukuran Sampel

N : Ukuran Populasi

e² : Persentase kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan penarikan

sampel (0,1).

Dalam rumus Slovin terdapat ketentuan sebagai berikut:

Nilai $e = 0,1$ (10%) untuk populasi dalam jumlah besar

Nilai $e = 0,2$ (20%) untuk populasi dalam jumlah kecil.

Diketahui jumlah populasi Desa Rompegading, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros yang merupakan Lokasi penelitian, yaitu terdapat 1700 jiwa (BPS, 2020) dengan tingkat persentase kelonggaran yang ditetapkan dalam penentuan sampel adalah 10% sehingga besarnya penarikan jumlah sampel penelitian adalah:

$$n = \frac{N}{1 + (N \times e^2)}$$

$$n = \frac{1700}{1 + (1700 \times 0,1^2)}$$

$$n = \frac{1700}{1 + (1700 \times 0,01)}$$

$$n = \frac{1700}{1 + 17}$$

$$n = 95$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah minimal 95 responden. Selanjutnya, teknik penentuan sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling* yang merupakan teknik penentuan sampel dengan beberapa pertimbangan atau kriteria tertentu antara lain masyarakat yang berumur minimal 17 tahun yang juga mata pencahariannya di dalam kawasan hutan serta beberapa aparat desa (Sugiyono, 2010). Adapun sampel dalam penelitian ini adalah 95 masyarakat Desa Rompegading, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros yang berumur minimal 17 tahun dan 3 aparat Pemerintah Desa dengan pertimbangan memiliki kedudukan tertinggi di setiap jabatan.

2.5 Variabel Data

Variabel data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Variabel Data Penelitian

Variabel	Indikator	Pernyataan
Persepsi masyarakat	Pengetahuan dan persepsi responden mengenai Taman Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hadirnya Taman Nasional sebagai upaya perlindungan ekosistem alam 2. Taman Nasional memiliki dampak dan peranan yang penting bagi masyarakat 3. Dimanfaatkan sebagai tempat penelitian 4. Dimanfaatkan sebagai tempat ilmu pengetahuan 5. Dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata dan rekreasi 6. Taman Nasional sebagai tempat pelestarian flora yang khas atau unik 7. Taman Nasional sebagai tempat pelestarian fauna yang khas atau unik 8. Taman Nasional sebagai salah satu warisan budaya
	Pengetahuan dan persepsi responden terkait pengelolaan hutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ekosistem hutan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia 2. Pengelolaan hutan partisipatif memungkinkan Masyarakat sekitar terlibat aktif dalam proses pengelolaan hutan 3. Akses masyarakat terhadap pengelolaan hutan sangat mudah dan baik 4. Kearifan lokal dan pengetahuan masyarakat sangat penting dalam pengelolaan hutan 5. Mengelola hutan dengan baik dan bijak merupakan tanggung jawab semua orang 6. Pengelolaan hutan yang lestari dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat sekitar 7. Pengelolaan hutan dapat meningkatkan nilai ekonomi masyarakat

		8. Dalam pengelolaan hutan, masyarakat harus mencakup nilai ekologi dan sosial
	Pengetahuan dan persepsi mengenai kemitraan konservasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemitraan konservasi sebagai tempat kerjasama antar masyarakat terkait pengelolaan hutan 2. Kemitraan konservasi mempunyai dampak dan peranan penting bagi masyarakat 3. Masyarakat memiliki hubungan yang baik dengan kemitraan konservasi dalam rangka pengelolaan hutan dalam kawasan Taman Nasional 4. Kemitraan konservasi dengan masyarakat memegang prinsip saling menghargai, saling percaya dan saling menguntungkan 5. Kemitraan konservasi hadir sebagai Upaya untuk kesejahteraan Masyarakat sekitar kawasan 6. Masyarakat harus memegang dan melakukan prinsip dengan kemitraan konservasi dalam rangka pengelolaan hutan 7. Kemitraan konservasi dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dengan pemberian akses dan fasilitas untuk mengembangkan potensi sumber daya alam 8. Kemitraan konservasi melibatkan Masyarakat dalam kegiatan pengembangan kawasan konservasi dan ekosistem, serta gotong royong

	<p>Pengetahuan dan persepsi dalam mempertahankan dan mengembangkan kelestarian sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alam/ekosistem memberikan manfaat bagi kehidupan 2. Sumber daya alam hayati dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat 3. Pengelolaan hutan dalam kawasan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat 4. Masyarakat mengelolah hutan secara berkelanjutan 5. Masyarakat perlu mempunyai kapasitas dalam upaya pelestarian hutan 6. Masyarakat mampu mempertahankan dan mengembangkan kelestarian sumber daya alam hayati 7. Pentingnya masyarakat dalam keikutsertaan menjaga kelestarian sumber daya alam hayati 8. Kelestarian hutan memberikan dukungan terhadap mutu kehidupan dan kesejahteraan masyarakat
<p>Partisipasi masyarakat</p>	<p>Partisipasi dalam upaya perencanaan dan pemanfaatan hutan dalam kawasan taman nasional</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat mentaati segala aturan yang ada di dalam kawasan Taman Nasional 2. Membantu dalam pelestarian hutan agar manfaatnya dapat terus dirasakan 3. Turut serta dalam mengembangkan kawasan hutan beserta ekosistemnya 4. Terlibat dalam perencanaan hutan yang dirancang oleh Taman nasional 5. Turut serta dalam pengambilan Keputusan 6. Berpartisipasi melakukan pemantauan/monitoring dalam kawasan hutan
	<p>Partisipasi dalam upaya melestarikan keanekaragaman hayati yang ada dalam kawasan taman nasional</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saya turut serta membantu memonitoring dalam hal pelestarian hutan 2. Saya tidak akan mengganggu ekosistem yang mempunyai peranan penting sebagai

		<p>penyangga kehidupan</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Saya akan menghindari kegiatan perburuan satwa liar 4. Saya akan menghindari kegiatan merambah dalam kawasan hutan 5. Saya akan menghindari kegiatan yang dapat merusak flora endemik yang ada dalam kawasan 6. Saya bersedia menyadarkan orang lain tentang pentingnya menjaga kelestarian dalam kawasan hutan konservasi
	Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan kemitraan konservasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saya tidak mengganggu dan merusak seluruh ekosistem yang ada dalam kawasan hutan 2. Saya akan ikut serta dalam pengambilan Keputusan terkait perencanaan dan pengembangan kawasan hutan 3. Saya akan membantu melakukan monitoring dan pengawasan terhadap kawasan hutan 4. Saya akan turut serta membantu mengembangkan pengelolaan areal pada zona tradisional Taman Nasional 5. Saya akan memanfaatkan sebaik-baiknya pemungutan HHBK berupa getah pinus, aren dan madu 6. Saya turut serta mendukung keberhasilan program pengelolaan hutan kemitraan guna mewujudkan kelestarian kawasan dan kesejahteraan masyarakat

Variabel data penelitian menjadi salah satu pendukung dalam melakukan penelitian, yang dimana berfungsi untuk menjelaskan hubungan kedua variabel, saat peneliti membahas hasil analisis hubungan antara variabel bebas dan terikat. Untuk variabel persepsi masyarakat memiliki beberapa indikator yaitu, pengetahuan responden mengenai Taman Nasional, pengetahuan dan persepsi responden terkait pengelolaan hutan, pengetahuan dan persepsi responden mengenai kemitraan konservasi dan pengetahuan dan persepsi responden dalam mempertahankan dan mengembangkan

kelestarian sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya. Sedangkan variabel partisipasi masyarakat memiliki tiga indikator yaitu, partisipasi responden dalam upaya perencanaan dan pemanfaatan kawasan hutan dalam Taman Nasional, partisipasi responden dalam Upaya melestarikan keanekaragaman hayati yang ada dalam kawasan Taman Nasional dan partisipasi responden dalam pelaksanaan kegiatan kemitraan konservasi.

2.6 Analisis Data

Data hasil penelitian akan di analisis dengan metode analisis deskriptif kuantitatif. Analisis tersebut merupakan suatu metode yang bertujuan untuk membuat gambar atau deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif yang menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dan hasilnya (Arikunto, 2006). Untuk mengukur persepsi dan partisipasi digunakan metode skala *likert*. Skala *likert* merupakan jenis skala yang digunakan untuk mengukur skala variabel penelitian seperti sikap, pendapatan dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2012).

Tabel 2. Skala penilaian

Penilaian	Skor
Sangat setuju	5
Setuju	4
Netral	3
Tidak setuju	2
Sangat tidak setuju	1

Jawaban dari responden kemudian akan dikelompokkan berdasarkan variabel dan mendapatkan hasil klasifikasi sikap dengan menggunakan prosedur penerapan sebagai berikut:

1. Mentabulasi jawaban responden
2. Menghitung nilai maksimal dan minimal, serta interval untuk menentukan

batas kategori kemudian membuat skala likert dengan rumus sebagai berikut:

- a. $Nilai\ maksimal = Skor\ tertinggi \times jumlah\ item\ pertanyaan \times jumlah\ responden$
- b. $Nilai\ minimal = Skor\ terendah \times jumlah\ item\ pertanyaan \times jumlah\ responden$
- c. $Interval = \frac{nilai\ maksimal - nilai\ minimal}{jumlah\ kategori}$

Tabel 3. Kriteria Penilaian Kategori Tiap Indikator Persepsi dan Partisipasi Masyarakat

Indikator		Kategori	Interval	
Persepsi Masyarakat	1. Pengetahuan dan persepsi responden mengenai Taman Nasional	Sangat Tidak Baik	760	1368
		Tidak Baik	1369	1977
	2. Pengetahuan dan persepsi responden terkait pengelolaan hutan	Netral	1978	2586
	3. Pengetahuan dan persepsi responden mengenai kemitraan konservasi	Baik	2587	3195
	4. Pengetahuan dan persepsi responden dalam mempertahankan dan mengembangkan kelestarian sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya	Sangat Baik	3196	3804
Partisipasi Masyarakat	1. Partisipasi responden dalam upaya perencanaan dan pemanfaatan kawasan hutan dalam Taman Nasional.	Sangat Rendah	570	1026
		Rendah	1027	1483
		Netral	1484	1940
	2. Partisipasi responden dalam upaya melestarikan keanekaragaman hayati yang ada dalam kawasan	Tinggi	1941	2397
		Sangat Tinggi	2398	2854

	Taman Nasional.			
	3. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan kemitraan konservasi			

Jumlah responden adalah 95 orang, nilai skala pengukuran terbesar adalah 5, nilai skala pengukuran terkecil adalah 1 dan jumlah pertanyaan tiap indikator persepsi masyarakat adalah 8, sedangkan jumlah pertanyaan tiap indikator partisipasi masyarakat adalah 6. Nilai minimal persepsi masyarakat per indikator yang didapatkan adalah interval 760 sedangkan nilai minimal partisipasi masyarakat per indikator yang didapatkan adalah interval 570. Sehingga perolehan keseluruhan nilai interval persepsi dan partisipasi masyarakat adalah hasil dari nilai minimal dijumlah dengan hasil perhitungan dari nilai maksimal kurang nilai minimal dibagi dengan jumlah kategori.

Tabel 4. Kriteria Penilaian Kategori Tiap Variabel Persepsi Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat

	Kategori	Interval	
Persepsi Masyarakat	Sangat Tidak Baik	3040	5472
	Tidak Baik	5473	7905
	Netral	7906	10338
	Baik	10339	12771
	Sangat Baik	12772	15204
Partisipasi Masyarakat	Sangat Rendah	1710	3078
	Rendah	3079	4447
	Netral	4448	5816
	Tinggi	5817	7185
	Sangat Tinggi	7186	8554

Jumlah responden adalah 95 orang, nilai skala pengukuran terbesar adalah 5, nilai skala pengukuran terkecil adalah 1 dan jumlah pertanyaan variabel persepsi masyarakat adalah 32, sedangkan jumlah pertanyaan variabel partisipasi masyarakat adalah 18. Nilai minimal persepsi masyarakat

yang didapatkan adalah interval 3040 sedangkan nilai minimal partisipasi masyarakat yang didapatkan adalah interval 1710. Sehingga perolehan keseluruhan nilai interval persepsi dan partisipasi masyarakat adalah hasil dari nilai minimal dijumlah dengan hasil perhitungan dari nilai maksimal kurang nilai minimal dibagi dengan jumlah kategori.